

Katalog: 9302021.7415
ISSN 2622-4518

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BUTON SELATAN
MENURUT LAPANGAN USAHA

2020-2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Katalog: 9302021.7415
ISSN 2622-4518

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BUTON SELATAN
MENURUT LAPANGAN USAHA**

2020-2024

Volume 9, 2025

<https://buselkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON SELATAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BUTON SELATAN
MENURUT LAPANGAN USAHA 2020-2024**

ISSN : 2622-4518
Nomor Publikasi : 74150.25004
Katalog BPS : 9302021.7415

Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii +94 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan

Penyunting : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Buton Selatan. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Buton Selatan secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2020 – 2024 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Rumbia, April 2024

Kepala,

Agung Septianto Wibowo, SST.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PENJELASAN TEKNIS	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM.....	1
BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	11
BAB III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BUTON SELATAN	59
BAB IV. PERTUMBUHAN DAN PERANAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA.....	67
LAMPIRAN TABEL.....	87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	7
Tabel 1.2.	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	8
Tabel 1.3.	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 3.1.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	62
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	65
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Buton Selatan (Juta rupiah), 2020-2024	66
Tabel 4.1.	Perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2020-2024	69
Tabel 4.2.	Perkembangan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian, 2020-2024	71
Tabel 4.3.	Perkembangan PDRB Kategori Industri Pengolahan, 2020-2024	72
Tabel 4.4.	Perkembangan PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, 2020-2024	73
Tabel 4.5.	Perkembangan PDRB Kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 2020-2024	75
Tabel 4.6.	Perkembangan PDRB Kategori Konstruksi , 2020-2024	76
Tabel 4.7.	Perkembangan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2020-2024	77

Tabel 4.8.	Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan, 2020-2024	79
Tabel 4.9.	Perkembangan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2020-2024	80
Tabel 4.10.	Perkembangan PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi, 2020-2024.....	81
Tabel 4.11.	Perkembangan PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, 2020-2024	82

<https://buselkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020-2024	89
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2020-2024	90
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	91
Tabel 4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	92
Tabel 7.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 9.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024	93
Tabel 10.	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024	94

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan pada publikasi ini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap pada satu tahun dasar
8. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<https://buselkab.bps.go.id>



PENJELASAN UMUM

BAB I

PENJELASAN UMUM

1.1. Pengertian PDRB

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan perlu dimonitor dan dievaluasi. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari kategori primer ke kategori sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan yang bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun

berdasarkan harga pada tahun dasar yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3. Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- a. Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas data PDRB;
- c. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- a. Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- b. Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- a. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- b. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- e. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
- f. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) serta penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- a. Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR) merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- b. Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM)

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*) Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- d. Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *International Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
(1)	(2)	(3)
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC).	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
	H. Transportasi dan Pergudangan
7. Pengangkutan dan Komunikasi	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor



2

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

BAB II

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsisten*) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

Secara umum, proses penyusunan nilai tambah bruto (NTB) pada kategori pertanian dilakukan dengan pendekatan produksi (*production approach*), yaitu dengan menghitung selisih antara nilai produksi (output) dan biaya produksi atau konsumsi antara.

Data produksi yang digunakan terdiri dari produksi utama dan produksi ikutan (sebagai *mark up*). Untuk menentukan suatu produksi utama apakah bisa dianggap sebagai produksi akhir atau belum, harus ditentukan terlebih dahulu wujud produksinya. Untuk produksi komoditas lain yang belum dapat dipantau perkembangannya atau belum tersedia datanya dimasukkan dalam pelengkap (*mark up*). Sesuai dengan panduan SNA 2008, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam penghitungan PDRB kategori pertanian. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Output tidak hanya produk utama dan produk ikutan yang dipasarkan, tetapi juga termasuk produk yang dihasilkan hanya untuk keperluan sendiri (*output for own consumption*).
2. Hasil produksi berupa output produk yang belum jadi, seperti tanaman semusim yang masih tumbuh di kebun dan tanaman tahunan yang belum berproduksi sama sekali juga dicakup sebagai output kategori pertanian. Hal ini karena produksi merupakan proses, bukan hanya terkait produk yang dihasilkan, karena output tidak hanya berarti produk jadi. Output dinilai dengan

total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang belum jadi tersebut. Tanaman tahunan atau hewan yang menghasilkan produk berulang (contoh: sapi perah, ayam petelur) yang belum menghasilkan merupakan output produk yang belum jadi disebut sebagai *Cultivated Biological Resources* (CBR) atau sumber daya hayati yang dibudidaya, yang diperlakukan sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan pada tanaman semusim (berumur satu tahun kurang) atau hewan yang menghasilkan produk tidak berulang (sekali panen/berproduksi), output produk yang belum jadi disebut sebagai *Work In Progress* (WIP). Pada WIP, yang dihitung adalah perubahannya saja (nilai WIP di akhir tahun dikurangi dengan nilai WIP di awal tahun), identik dengan penghitungan selisih stok barang setengah jadi pada lapangan usaha industri pengolahan.

3. Kegiatan aktivitas pertanian ilegal (*illegal activities*) dicakup juga dalam output kategori ini.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup tiga subkategori dengan sembilan jenis kegiatan yaitu:

1. Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian
 - a. Tanaman pangan
 - b. Tanaman hortikultura semusim
 - c. Perkebunan semusim
 - d. Tanaman hortikultura tahunan dan lainnya
 - e. Perkebunan tahunan
 - f. Peternakan
 - g. Jasa pertanian dan perburuan
2. Kehutanan dan penebangan kayu
3. Perikanan

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dicakup dalam kegiatan ini adalah padi, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya (talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah. Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (*mark up*). Perubahan SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman pangan adalah penghitungan output dan NTB dari *work in progress* (WIP).

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari kegiatan survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan BPS RI. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari kegiatan survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari kegiatan survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan BPS RI.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Subkategori ini meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan tanaman hortikultura semusim dan tahunan. Tanaman hortikultura semusim yaitu tanaman yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dicakup dalam subklasifikasi ini adalah tanaman hortikultura sayuran daun (kubis/kol, kembang kol, brokoli, petsai/sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain), tanaman hortikultura sayuran

buah (ketimun, terung, tomat, labu siam, gambas/oyong, dan sejenisnya), tanaman hortikultura sayuran umbi (kentang, wortel, bawang merah, bawang putih, lobak, dan lain-lain), jamur, tanaman hortikultura buah (semangka, blewah, melon, timun suri, dan lain-lain), tanaman kacang-kacangan hortikultura (buncis, kacang merah, kacang kapri, dan sejenisnya), serta tanaman bunga yang produknya berupa bunga potong dan kuncup bunga (anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam, anthurium bunga, euphorbia, adenium/kamboja jepang, ixora/soka, dan tanaman bunga lainnya). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (*mark up*). Perubahan SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura semusim adalah penghitungan output dan NTB dari *work in progress* (WIP).

Kelompok tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman, serta hortikultura lainnya yang meliputi tanaman biofarmaka dan tanaman hias bukan bunga. Komoditas yang dicakup dalam jenis kegiatan ini adalah tanaman hortikultura buah-buahan tahunan (anggur, jeruk, rambutan, alpukat, durian, duku, pisang, pepaya, jambu biji, jambu air, nangka/cempedak, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, apel, markisa, strawberry, dan buah-buahan tahunan lainnya), tanaman biofarmaka rimpang (jahe, kinyit, temulawak, temugiring, temukunci, kencur, lengkuas, dan biofarmaka rimpang lainnya), tanaman biofarmaka non rimpang (kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, dan biofarmaka non rimpang lainnya), serta tanaman hias bukan bunga (cemara, bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia/pisang-pisangan, dracanea, sansifera, palem, dan tanaman hias bukan bunga lainnya). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (*mark up*). Perubahan SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura tahunan adalah penghitungan output dan NTB dari CBR.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Hortikultura BPS RI. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang

dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari survei di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Ongkos Usaha Hortikultura (SOUH).

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan perkebunan tahunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta) yang menghasilkan komoditas perkebunan semusim dan tahunan. Komoditas perkebunan semusim, yaitu perkebunan yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali masa penanaman. Komoditas yang dicakup dalam jenis kegiatan ini adalah tebu, tembakau, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), tanaman biji-bijian penghasil minyak makan (wijen, bunga matahari, dan sejenisnya), tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan (jarak dan lain-lain), serta tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak. Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (*mark up*). Perubahan SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura tahunan adalah penghitungan output dan NTB dari *work in progress* (WIP).

Sedangkan tanaman perkebunan tahunan yaitu perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dicakup dalam subklasifikasi ini adalah kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, kopi, teh, kakao, pala, lada, kayu manis, kemiri, cengkeh, sereh wangi, nilam, dan perkebunan tahunan lainnya (contoh: kapuk). Selain produk utama di atas, juga dicakup pula produk ikutan dari masing-masing komoditas, serta komoditas lainnya yang masuk dalam kategori pelengkap (*mark up*). Perubahan SNA 2008 yang diterapkan pada penghitungan PDRB pada tanaman hortikultura tahunan adalah penghitungan output dan NTB dari CBR.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari data yang berada di bawah pengawasan Dinas Pertanian bidang perkebunan dan hortikultura. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari survei di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik

Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Subkategori peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari data yang dikelola oleh Dinas Pertanian bidang peternakan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdirektorat Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat

pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkapan satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari survei yang berada dibawah pengawasan Subdirektorat Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari data yang terhimpun pada data yang dikelola oleh Dinas Pertanian bidang kehutanan, dan survei-survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Kehutanan BPS RI. Data harga produsen diperoleh dari survey yang berada dibawah

pengawasan Subdirektorat Statistik Kehutanan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Kehutanan BPS RI.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam subkategori ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari data yang terhimpun pada data yang dikelola oleh Dinas Pertanian bidang perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari hasil survei di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen BPS RI serta data Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdesaan BPS RI. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdirektorat Statistik Perikanan BPS RI.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA

2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress (WIP)*. Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode

penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data harga/ indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan indeks harga produsen (IHP) gas dan panas bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan Indonesia Crude Price (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/ Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan

digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas (KBLI 2009: kode 19).

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Industri makanan dan minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, *snuff*, *chewing* dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain (KBLI 2009: kode 12).

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordena, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain (KBLI 2009: kode 13 dan 14).

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain (KBLI 2009: kode 15).

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (KBLI 2009: kode 16).

2.3.7 Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan (KBLI 2009: kode 17 dan 18).

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi (KBLI 2009: kode 20 dan 21).

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya: pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan

peralatan, serta pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak (KBLI 2009: kode 22).

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini (KBLI 2009: kode 23).

2.3.11 Industri Logam Dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain (KBLI 2009 : kode 24).

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam murni (seperti suku cadang, kontainer/wadah dan struktur) yang pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik (KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27).

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen

utama yang dihasilkan secara khusus. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga (KBLI 2009: kode 28).

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Golongan pokok ini mencakup industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer (KBLI 2009 : kode 29 dan 30).

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus (KBLI 2009: kode 31).

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual. Proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin

dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya (KBLI 2009: kode 32 dan 33).

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS RI.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan Subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.5 Ketenagalistrikan

Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2.5.1 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Golongan ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

2.6 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini,

karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data untuk subkategori ini berasal dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi BPS RI; Data Harga diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen-BPS RI; dan Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih-BPS.

2.7 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol,

jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku kategori konstruksi adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas berasal dari survei-survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Neraca Barang BPS RI; produksi aspal dari data yang terhimpun pada Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); data ekspor semen berasal dari data yang terhimpun pada Subdirektorat Statistik Ekspor BPS RI dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); data impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit terhimpun pada Subdirektorat Statistik Impor BPS RI. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan berasal dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS RI.

2.8 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikuti kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.8.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.8.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam Subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik yang datanya terhimpun pada Subdirektorat Neraca Barang dan Neraca Jasa BPS RI, Statistik Transportasi BPS RI, Impor barang BPS RI, Indeks Harga Konsumen BPS RI, dan survei lainnya yang berada di bawah pengawasan Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.9 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan

jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.9.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT.Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT.KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.9.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT.Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan yang berasal dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.9.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari survei-survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.9.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik

bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal *ferry*.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

2.9.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT.Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT.Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT.Garuda Indonesia; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9.6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos, dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti: PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksha, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang

seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.10.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB Subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari survei-survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Pariwisata BPS RI. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang berada di bawah naungan Subdirektorat Statistik Pariwisata BPS RI.

2.10.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan Subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi subkategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi BPS.

2.11 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak.

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video *tape* atau *disk* untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti *editing*, *cutting*, *dubbing* film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari hasil survei yang

berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.12 Jasa Keuangan Dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.12.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan. Sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, *baitul maal watanwil* dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) yang dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran

untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.12.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari hasil survei di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.12.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.12.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari survey dibawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil

pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB)

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil survei yang berada di bawah pengawasan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.13 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah *property* berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Kategori Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.14 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi,

jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari hasil survei yang berada di bawah pengawasan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari survei dibawah pengawasan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.15 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan

dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.16 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan dibawah pengawasan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang berada dibawah pengawasan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.18 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, hiburan, dan rekreasi; Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa swasta lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan taruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang berada di bawah pengawasan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdirektorat Statistik Demografi, Susenas, dan Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran Per kapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional, Sensus Penduduk, Subdirektorat PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukan Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund*, *The World Bank*, *The World Health Organization* (WHO),

the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.

<https://buselkab.bps.go.id>



TINJAUAN EKONOMI

BAB III

TINJAUAN EKONOMI

Perekonomian Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2024 masih mengalami perkembangan yang positif. Nilai Capaian PDRB Buton Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2024 tercatat mencapai 3,83 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut secara nominal mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan PDRB Kabupaten Buton Selatan menunjukkan tren positif seiring dengan adanya peningkatan produksi dari beberapa sector lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Buton Selatan dan pengaruh kenaikan harga komoditi yang dipengaruhi.

Nilai PDRB Kabupaten Buton Selatan juga menunjukkan adanya peningkatan jika ditinjau berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Tahun 2024, PDRB Kabupaten Buton Selatan atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 2,32 triliun rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan sebesar 107,16 milyar rupiah dibanding tahun 2023. Berbeda dengan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku, peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 memberikan informasi mengenai peningkatan ekonomi yang hanya dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas produksi seluruh lapangan usaha di Kabupaten Buton Selatan.

3.1 Struktur Ekonomi

Besarnya kontribusi berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Buton Selatan didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buton Selatan.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam membangun PDRB Buton Selatan fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dengan meningkatnya output kategori lapangan usaha yang lainnya, menjadikan peranan sektor ini terhadap PDRB regional Buton Selatan mengalami sedikit penurunan namun tidak signifikan, yaitu menjadi 35,63 persen pada tahun 2023 dan 33,71 persen pada

tahun 2024. Ditengah wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang cukup stabil dan tidak terlalu terdampak oleh adanya wabah pandemi. Kategori ini sekaligus menjadi penyumbang PDRB terbesar dalam struktur perekonomian regional.

Tabel 3.1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,40	33,37	34,45	35,63	33,71
B	Pertambangan dan Penggalian	25,65	24,51	24,32	24,04	26,24
C	Industri Pengolahan	3,57	3,64	3,71	2,86	3,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,26	0,24	0,24	0,23
F	Konstruksi	15,04	15,96	15,16	14,74	13,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,56	8,86	8,98	9,23	9,48
H	Transportasi dan Pergudangan	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
J	Informasi dan Komunikasi	1,03	1,03	1,02	1,00	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,88	0,88	0,86	0,82
L	Real Estat	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	2,51	2,28	2,27	2,52
P	Jasa Pendidikan	5,78	5,80	5,85	6,05	5,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,46	1,40	1,33	1,28
R,S,T, U	Jasa lainnya	0,62	0,61	0,60	0,62	0,61
	TOTAL	100	100	100	100	100

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lapangan usaha berikutnya yang memberikan peranan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat adalah kategori Pertambangan dan Penggalian. Angkanya mendekati persentase distribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada tahun 2024, pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat Buton Selatan sebesar 26,24 persen. Angka ini berarti, setiap 100 juta nilai tambah yang dihasilkan dari pergerakan ekonomi regional, 26,24 juta nya berasal dari output kategori pertambangan dan penggalian. Pergerakan peran kategori ini terlihat berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020

kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian ini mencapai angka 25,65 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 24,51 persen dan cenderung menurun pada dua tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2024 kontribusi Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kembali menjadi 26,24 persen.

Berdasarkan data kontribusi kedua kategori primer di atas yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian, terlihat bahwa aktifitas ekonomi Kabupaten Buton Selatan masih sangat bergantung pada hasil alam, yaitu pada tahun 2024 jumlah keduanya mencapai 59,95 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai aktivitas ekonomi pada kategori industri pengolahan yang seyogyanya perkembangannya berbanding lurus dengan berkembangnya lapangan usaha kategori primer di suatu wilayah.

Lapangan usaha Industri Pengolahan masih bergerak pada kisaran 3 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, untuk setiap 100 juta nilai tambah yang dihasilkan dari pergerakan ekonomi regional di Buton Selatan, hanya 3,04 juta kontribusi dari kategori ini. Angka yang tergolong masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Buton Selatan. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat sekaligus pemerintah dalam usaha meningkatkan pergerakan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan. Kategori Konstruksi menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 13,99 persen. Aktivitas perdagangan besar maupun eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar keempat terhadap perekonomian di Buton Selatan yaitu sebesar 9,48 persen. Setelahnya, disusul oleh kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,99 persen. Sisanya, 12 dari 17 kategori lapangan usaha berada di bawah 3 persen.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, masih banyak kategori lapangan usaha yang perlu dipacu aktivitas produksinya dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Buton Selatan terutama yang hingga tahun 2024 kontribusinya bahkan tidak mencapai 1 persen. Misalnya, lapangan usaha kategori H, yaitu transportasi dan pergudangan sebagai kategori penunjang kegiatan pada kategori G yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Selain itu, kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi juga berpotensi untuk dioptimalisasi lagi, mengingat kebutuhan akses informasi dan komunikasi pada

masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, lapangan usaha kategori I, penyediaan akomodasi dan makan minum juga berpeluang untuk dapat ditingkatkan.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan 2010) di daerah atau wilayah tersebut. Pengukurannya menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar adalah tahun 2010.

Laju pertumbuhan ekonomi Buton Selatan tahun 2024 sebesar 4,84 persen. Angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi dibanding tahun 2023 yang hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,41 persen. Laju pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 15,04 persen.

Hampir seluruh kategori lapangan usaha di Kabupaten Buton Selatan mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Laju pertumbuhan PDRB Buton Selatan dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 secara keseluruhan tersaji pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	2,96	8,57	6,95	-1,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-9,87	-3,53	-0,48	-2,62	15,04
C	Industri Pengolahan	-2,70	2,30	7,12	-19,92	8,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,29	8,93	7,66	5,85	2,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,75	0,13	-1,38	6,21	0,27
F	Konstruksi	-0,69	9,42	-1,26	1,33	0,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,15	6,56	5,91	4,76	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,59	-0,07	1,52	0,49	2,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,80	0,54	7,69	4,15	6,15
J	Informasi dan Komunikasi	7,27	3,74	9,40	8,82	4,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,90	2,14	5,40	4,26	0,42
L	Real Estat	0,91	3,22	4,15	-2,30	2,32
M, N	Jasa Perusahaan	-2,34	0,55	8,53	4,49	5,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,32	-0,03	-0,07	6,14	15,04
P	Jasa Pendidikan	6,73	3,32	6,46	6,66	3,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,83	0,79	4,80	0,79	2,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,23	0,72	6,50	7,45	4,46
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-1,39	2,29	3,90	2,41	4,84

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB perkapita adalah ukuran produktivitas netto per kapita, yang diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Dengan menganggap bahwa setiap orang/penduduk berpartisipasi, maka PDRB perkapita memberi gambaran kekuatan atau kemampuan rata-rata setiap orang/penduduk dalam penciptaan nilai tambah bruto.

Nilai PDRB per kapita Buton Selatan atas dasar harga berlaku senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Secara nominal pada tahun 2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku per kapita per tahun mencapai 37,81 juta rupiah. Kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dikarenakan pengaruh inflasi selama tahun berjalan. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 mencapai 22,93 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024, PDRB per kapita sedikit meningkat menjadi sebesar 21,87 juta rupiah. Dengan kata lain bahwa produktivitas masyarakat secara umum mulai membaik sedikit demi sedikit sehingga nilai tambah aktivitas ekonomi perkapita di Buton Selatan naik sebesar 1,06 juta rupiah dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Dari data pada tabel 3.3 terlihat bahwa, peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun berpengaruh terhadap PDRB perkapita yang dihasilkan setiap tahunnya, terlepas dari apakah laju pertumbuhan PDRB ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga terus meningkat. Pada tahun 2024, kenaikan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi hanya mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 4,84 persen.

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Buton Selatan (Juta rupiah), 2020-2024

Uraian (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023* (5)	2024** (6)
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
- ADHB	2874,73	2993,97	3314,10	3593,17	3826,60
- ADHK	2033,59	2080,20	2161,37	2213,51	2320,67
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	28,41	29,59	32,75	35,51	37,81
- ADHK	20,10	20,56	21,36	21,87	22,93
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010		2,3	3,9	2,4	4,8
Jumlah Penduduk hasil proyeksi (ribu orang)	95,32	96,32	97,95	99,58	101,19

* **Angka sementara**

** **Angka sangat sementara**



PERKEMBANGAN PDRB

BAB IV

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kabupaten Buton Selatan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Pengelompokan lapangan usaha mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2020-2024.

4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori lapangan usaha ini mencakup Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari Golongan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Kategori ini masih menjadi tumpuan bagi masyarakat Buton Selatan termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	960,06	999,00	1141,61	1280,31	1289,97
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	634,21	652,99	708,93	758,20	750,42
Peranan terhadap PDRB (%)	33,40	33,37	34,45	35,63	33,71
Laju Pertumbuhan (%)	5,34	2,96	8,57	6,95	-1,03

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Nilai tambah yang dihasilkan Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2024 mencapai 750,42 milyar rupiah atau sebesar 33,71 persen dari total PDRB Kabupaten Buton Selatan. Selama lima tahun terakhir, nilai tambah nominal yang dihasilkan oleh kategori ini terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tergambar pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Dilihat dari segi peranannya, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ini selalu memberikan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan pada kisaran angka 33-35 persen, berbeda dengan laju pertumbuhan riilnya yang cenderung berfluktuasi. Pada gambar 4.1 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan kategori ini selalu positif kecuali di tahun terakhir, artinya kategori ini secara riil dari tahun 2020 hingga tahun 2023 masih mengalami pertumbuhan meskipun mengalami perlambatan terutama terlihat pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan tertinggi. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan riil kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan menjadi -1,03 persen.

4.2 Pertambangan dan Penggalan

Kategori Pertambangan dan Penggalan memberikan kontribusi kedua terbesar di Kabupaten Buton Selatan. Persentasenya berada sekitar angka 24 hingga 26 persen, tidak jauh berbeda dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Secara nominal, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 nilai tambah kategori ini secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2021 Kategori Pertambangan dan Penggalan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, nilai tambah yang dihasilkan kategori lapangan usaha ini sebesar 737,47 milyar rupiah. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 863,86 milyar rupiah pada tahun 2023, kemudian meningkat sebesar 1.004,02 miliar rupiah di tahun 2024. Namun jika ditinjau dari nilai tambah riil yang dihasilkan, volume produksi pada kategori ini cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020 aktivitas pertambangan dan penggalan mengalami penurunan volume produksinya hingga tahun 2023. Pada tahun 2020, nilai tambah riil sebesar 547,74 milyar rupiah dan terus menurun hingga pada tahun 2023 mencapai 512,07 milyar rupiah, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 589,08 milyar rupiah dengan asumsi harga konstan dengan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Tabel 4.2. Perkembangan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	737,47	733,76	806,13	863,86	1004,02
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	547,74	528,38	525,85	512,07	589,08
Peranan terhadap PDRB (%)	25,65	24,51	24,32	24,04	26,24
Laju Pertumbuhan (%)	-9,87	-3,53	-0,48	-2,62	15,04

* **Angka sementara**** **Angka sangat sementara**

Pada Kategori Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Buton Selatan adalah Subkategori Pertambangan Bijih Logam serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Sedangkan untuk subkategori lapangan usaha Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi serta Pertambangan Batubara dan Lignit tidak ada. Pada tahun 2024 kategori ini turut menyusun 26,24 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian di Kabupaten Buton Selatan.

Laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan nilai negatif di tahun 2020 hingga 2023, kemudian meningkat di tahun 2024. Pengamatan pada kategori lapangan usaha ini selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa angka ini cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan kategori ini kembali mengalami kontraksi dari 0,14 persen pada tahun 2019 menjadi -9,87 persen. Kemudian hingga tahun 2023 pertumbuhan kategori ini menurun menjadi -2,62 persen. Berita baiknya pada tahun 2024, kategori ini mengalami pertumbuhan mencapai 15,04 persen.

4.3 Industri Pengolahan

Kategori lapangan usaha ini mencakup 16 subkategori. Subkategori yang dominan dalam aktivitas perekonomian masyarakat Buton Selatan adalah industri makanan dan minuman serta industri logam dasar. Secara nominal, nilai tambah yang dihasilkan kategori ini senantiasa meningkat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024. Pada tahun 2020, nilai tambah sebesar 102,52 miliar rupiah dihasilkan oleh kategori lapangan usaha ini. Peningkatan harga dan volume produksi yang terjadi

setiap tahun menjadikan nilai tersebut meningkat hingga mencapai 122,79 miliar rupiah pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan volume produksi sehingga nilai tambahnya menjadi 102,76 miliar rupiah pada tahun 2023. Berita baiknya, nilai tambah kategori industri pengolahan ini kembali meningkat menjadi 116,43 miliar rupiah pada tahun 2024.

Hal serupa juga terlihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan. Dengan asumsi harga konstan pada tingkat harga di tahun 2010, nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini juga meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2023. Hal ini berarti, setidaknya selama tahun 2020 hingga tahun 2022 peningkatan volume produksi mampu dihasilkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 volume produksi cenderung menurun yang mengakibatkan menurunnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mencapai 62,36 miliar rupiah.

Peranan industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan relatif konstan pada kisaran angka tiga persen. Berbeda dengan laju pertumbuhan yang cenderung meningkat terutama dari tahun 2020 hingga 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 hingga 2022 aktifitas produksi dari lapangan usaha ini tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada tahun 2023 laju pertumbuhan mengalami penurunan dari 7,12 persen pada tahun 2022 menjadi -19,92 persen di tahun 2023. Penurunan ini dipicu karena adanya penurunan volume produksi pada subkategori industri makanan dan minuman. Kemudian pada tahun 2024, laju pertumbuhan kategori Industri pengolahan meningkat menjadi 8,81 persen.

Tabel 4.3. Perkembangan PDRB Kategori Industri Pengolahan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	102,52	108,91	122,79	102,76	116,43
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	71,06	72,69	77,87	62,36	67,85
Peranan terhadap PDRB (%)	3,57	3,64	3,71	2,86	3,04
Laju Pertumbuhan (%)	-2,70	2,30	7,12	-19,92	8,81

* **Angka sementara**

** **Angka sangat sementara**

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Secara nominal, kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 1,33 miliar rupiah terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,04 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai nominal pada kategori lapangan usaha ini terus terjadi sepanjang lima tahun terakhir. Dimana, dari tahun 2020 hingga 2024 peningkatan secara total mencapai 0,36 miliar rupiah (PDRB atas dasar harga berlaku). Namun, jika kita mengamati peningkatan riil nya dalam lima tahun terakhir tidak sebesar peningkatan nominalnya, yaitu hanya senilai 0,25 miliar rupiah. Meskipun demikian, nilai PDRB riil yang masih menunjukkan peningkatan setiap tahun ini menggambarkan bahwa masih ada peningkatan volume produksi pada kategori lapangan usaha ini.

Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	0,98	1,07	1,20	1,29	1,33
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	0,92	1,01	1,08	1,15	1,17
Peranan terhadap PDRB (%)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
Laju Pertumbuhan (%)	1,29	8,93	7,66	5,85	2,20

* **Angka sementara**

** **Angka sangat sementara**

Secara proporsi terhadap PDRB, kategori ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 5 tahun terakhir yaitu relatif konstan di angka 0,04 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan adanya fluktuasi. Dari tahun 2020 hingga 2022 kategori ini menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini terus meningkat hingga menyentuh angka 7,66 persen pada tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun dengan laju pertumbuhan terbesar pada kategori lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sepanjang lima tahun terakhir. Meskipun tren ini menunjukkan perlambatan, nilainya masih positif, artinya volume produksi yang dihasilkan oleh kategori lapangan usaha ini masih terus meningkat, meskipun peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan volume produksi di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan volume

produksi kembali nunjukkan tren yang menurun di tahun 2023, yaitu mencapai angka 5,85 persen, kemudian mengalami perlambatan kembali pada tahun 2024 yang mencapai 2,20 persen.

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Berbagai aktivitas yang tercakup dalam Kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, antara lain kegiatan pengadaan air bersih baik oleh PDAM maupun swasta, kegiatan pengelolaan sampah dan limbah (padat dan cair, baik yang berasal dari industri maupun rumah tangga), serta kegiatan daur ulang, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Meskipun kategori ini memiliki kontribusi terkecil terhadap total PDRB Buton Selatan, aktivitas dari kategori ini berdampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Nilai tambah dari Kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,81 miliar rupiah. Nilai ini secara konsisten selalu meningkat selama rentang tahun 2020-2024. Terlihat pada tabel 4.5, nilai tambah yang dihasilkan kategori ini pada tahun 2020 sebesar 7,78 miliar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga masing-masing tahun mencapai nilai tambah secara berturut-turut sebesar 7,83 miliar rupiah pada tahun 2021; 7,90 miliar rupiah pada tahun 2022; 8,66 miliar rupiah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi 8,81 miliar rupiah.

Jika ditinjau dari perkembangan nilai tambah pada harga konstan 2010, nilai yang dihasilkan juga terlihat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai tambah yang dihasilkan kategori lapangan usaha ini sebesar 6,06 miliar rupiah. Nilai ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 menghasilkan nilai tambah sebesar 6,37 miliar rupiah. Peningkatan yang terjaga setiap tahun ini menunjukkan bahwa volume produksi yang dihasilkan oleh kategori lapangan usaha ini terus meningkat sepanjang lima tahun terakhir, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan air bersih, pengelolaan sampah, limbah, serta aktivitas daur ulang terus meningkat.

Tabel 4.5. Perkembangan PDRB Kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	7,78	7,83	7,90	8,66	8,81
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	6,06	6,06	5,98	6,35	6,37
Peranan terhadap PDRB (%)	0,26	0,24	0,24	0,23	0,26
Laju Pertumbuhan (%)	8,93	7,66	5,85	2,20	8,93

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi kategori ini relatif stagnan, yaitu berada pada kisaran 0,23-0,26 persen. Terlihat bahwa peranan kategori lapangan usaha ini terhadap PDRB total Kabupaten Buton Selatan relatif kecil dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya. Sedangkan laju pertumbuhannya selama lima tahun terakhir 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Percepatan kuantitas produksi terlihat pada tahun 2024 saja. Sedangkan tahun 2020 hingga 2023 terjadi perlambatan namun masih terjaga dalam nilai yang positif. Nilai laju pertumbuhan yang konsisten positif ini mengindikasikan bahwa tidak ada penurunan volume produksi pada kategori ini selama rentang waktu lima tahun terakhir.

4.6 Konstruksi

Pada tahun 2024 lapangan usaha kategori konstruksi menyumbang sebesar 535,19 miliar rupiah terhadap total aktivitas produksi Kabupaten Buton Selatan. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 529,80 miliar rupiah pada tahun 2023. Ketika diamati nilai tambah yang dihasilkan kategori ini selama lima tahun terakhir, secara nominal senantiasa mengalami peningkatan (PDRB atas dasar harga berlaku). Namun, jika dilihat persentase kontribusinya terhadap total nilai tambah yang dihasilkan, tidak selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 dan 2023, peranan kategori lapangan usaha konstruksi ini mengalami penurunan persentase kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan, yaitu dari 15,96 persen pada tahun 2022 menjadi 15,16 persen di tahun 2022 dan 14,74 persen di tahun 2023. Hal

ini sangat mungkin terjadi, terutama ketika kategori lainnya mampu memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar. Seperti kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian yang masing-masing memiliki peran hampir sepertiga dari nilai tambah hasil kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Kategori Konstruksi , 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	432,43	477,91	502,40	529,80	535,19
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	293,81	321,49	317,43	321,65	323,02
Peranan terhadap PDRB (%)	15,04	15,96	15,16	14,74	13,99
Laju Pertumbuhan (%)	-0,69	9,42	-1,26	1,33	0,42

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh kategori konstruksi meningkat setiap tahunnya dalam rentang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai tambah yang dihasilkan adalah sebesar 293,81 miliar rupiah. Nilai ini terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 323,02 miliar rupiah. Nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang terus meningkat ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan volume produksi pada kategori lapangan usaha konstruksi yang berlangsung setiap tahun sepanjang lima tahun terakhir.

Melalui pengamatan pada nilai PDRB atas dasar harga konstan setiap tahunnya, diperoleh data laju pertumbuhan kategori konstruksi Kabupaten Buton Selatan cukup berfluktuatif. Dalam beberapa tahun menunjukkan tren positif dan beberapa tahun lainnya menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 aktivitas perekonomian pada lapangan usaha ini menunjukkan adanya kenaikan laju pertumbuhan. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan mencapai -1,26 persen pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 1,33 persen pada tahun 2023. Dan pada tahun 2021 baik kontribusi maupun laju pertumbuhannya mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kenaikan laju pertumbuhan kategori konstruksi mencapai

9,42 persen pada tahun 2021, meningkat tajam dari tahun 2020 yang menurun -0,69 persen. Visualisasi dari data ini selengkapnya disajikan dalam gambar 4.4.

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Nilai tambah yang dihasilkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2024 adalah sebesar 362,65 miliar rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 yang memiliki nilai tambah sebesar 331,69 miliar rupiah. Peningkatan nilai tambah terjadi setiap tahun selama rentang lima tahun terakhir. Begitu pula dengan volume produksinya. Hal ini dijelaskan melalui nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, nilai PDRB adhk kategori ini sebesar 178,62 miliar rupiah. Dengan peningkatan yang terus terjadi hingga tahun 2024, nilai tambah riil yang dihasilkan sebesar 223,71 miliar rupiah.

Tabel 4.7. Perkembangan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	246,00	265,16	297,45	331,69	362,65
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	293,81	321,49	317,43	321,65	323,02
Peranan terhadap PDRB (%)	8,56	8,86	8,98	9,23	9,48
Laju Pertumbuhan (%)	-5,15	6,56	5,91	4,76	5,94

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sama dengan pola yang ada pada nominal PDRB yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, peranan/ kontribusi kategori ini terhadap PDRB total Kabupaten Buton Selatan juga senantiasa meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan kontribusi. Pada tahun 2020, kategori Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini berperan sebesar 8,56 persen terhadap total nilai tambah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan. Peningkatan kembali dicapai pada tahun 2024 yaitu menjadi 9,48 persen.

Laju pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,15 persen dibanding tahun 2019 yang laju pertumbuhannya mencapai 5,65 persen. Selama lima tahun

terakhir, laju pertumbuhan kategori ini selalu berfluktuasi. Percepatan senantiasa diselingi dengan adanya perlambatan. Percepatan laju pertumbuhan terjadi pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami perlambatan. Selama 5 tahun terakhir, kenaikan laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun ini yaitu naik dari -5,15 persen di tahun 2020 menjadi 6,56 persen di tahun 2021.

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori lapangan usaha yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Namun tiga diantaranya tidak ada di Kabupaten Buton Selatan, yaitu angkutan rel, angkutan laut, dan angkutan udara.

Pada tahun 2024, kategori lapangan usaha transportasi dan pergudangan menghasilkan nilai tambah sebesar 33,46 miliar rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai 31,98 miliar ^{* Angka sementara} ~~rupiah~~. ^{** Angka sangat sementara} Sedangkan jika ditinjau secara riil, dengan menggunakan dasar harga konstan 2010, nilai tambah yang dihasilkan terlihat mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa, selain adanya peningkatan harga pada nilai produksi, peningkatan nilai tambah hasil produksi kategori ini juga disebabkan karena adanya peningkatan volume produksi yang dihasilkan. Namun pada tahun 2021 nilai tambah riil yang dihasilkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada saat pandemi covid-19 mulai melanda Buton Selatan, pemerintah daerah sempat memberlakukan pembatasan akses keluar masuk wilayah Buton Selatan sehingga aktivitas transportasi umum khususnya transportasi darat yang keluar masuk Buton Selatan dibatasi. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan karena sudah adanya kelonggaran akses keluar masuk Kabupaten Buton Selatan.

Secara umum, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan negatif selama tahun 2020 hingga 2021, namun kembali meningkat di tahun 2022 hingga 2024. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 8,47 persen, sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2020 dan 2021, mengalami kontraksi yakni dari -0,07 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, laju pertumbuhan kategori ini kembali mencatatkan pertumbuhan positif yaitu

sebesar 1,52 persen dan terus meningkat hingga tahun 2024 meningkat sebesar 2,49 persen.

Tabel 4.8. Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	25,93	26,14	28,81	31,98	33,46
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	22,44	22,43	22,77	22,88	23,45
Peranan terhadap PDRB (%)	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
Laju Pertumbuhan (%)	-1,59	-0,07	1,52	0,49	2,49

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Nilai tambah yang dihasilkan kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,04 miliar rupiah. Nilai tambah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam selang lima tahun terakhir, nilai tambah kategori ini meningkat sebesar 1,13 miliar rupiah. Namun peningkatan ini tidak terlepas dari dampak kenaikan harga yang umum terjadi setiap tahunnya. Melalui nilai tambah atas dasar harga konstan 2010, dapat diidentifikasi pertumbuhan riil yang terjadi dalam aktivitas perekonomian masyarakat khususnya pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan perkembangan kuantitas volume produksi yang dihasilkan, juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Lebih spesifik dapat kita lihat pada tabel 4.9 untuk pertambahan nilai produksi riil kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ini selama 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan harga dasar tahun 2010, nilai produksi yang mampu dihasilkan kategori ini sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 2,77 miliar rupiah. Kuantitas dan/atau kualitas hasil produksi ini terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2024 nilai produksi yang dihasilkan oleh kategori lapangan usaha ini mencapai 3,32 miliar rupiah. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan kuantitas dan/atau kualitas output yang dihasilkan sebesar 0,55 miliar rupiah dalam waktu lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan riil sebesar 6,15 persen. Pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023 dengan nilai pada tahun tersebut sebesar 4,15 persen.

Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2020-2024

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	3,91	3,96	4,36	4,63	5,04
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	2,77	2,79	3,00	3,13	3,32
Peranan terhadap PDRB (%)	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
Laju Pertumbuhan (%)	0,54	7,69	4,15	6,15	0,54

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 sebesar 0,13 persen. Meskipun secara nilai nominal selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan secara keseluruhan menunjukkan tren yang menurun meski tidak signifikan. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kategori lapangan usaha lainnya yang menyumbang lebih banyak nilai tambah terhadap PDRB Buton Selatan.

4.10 Informasi dan Komunikasi

Nilai tambah kategori ini secara nominal pada tahun 2024 yaitu sebesar 37,63 miliar rupiah. Nilai ini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama rentang lima tahun terakhir. Demikian juga nilai tambah riil yang dihasilkan oleh kategori ini yang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan terdapat peningkatan aktivitas produksi pada kategori informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun di Kabupaten Buton Selatan.

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas hampir di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital, terutama jasa telekomunikasi. Namun, secara keseluruhan peranan

kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2020-2024 terus menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak signifikan. Secara berturut-turut peranan kategori ini terhadap total nilai tambah yang dihasilkan oleh keseluruhan aktivitas perekonomian di Buton Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu sebesar 0,87 persen; 0,88 persen; 0,88 persen; 0,86 persen; dan 0,82 persen pada tahun 2021.

Demikian juga jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhannya yang menunjukkan kondisi fluktuatif dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 7,27 persen pada tahun 2020; kembali mengalami percepatan tahun 2021 menjadi 3,74 persen; dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 9,40 persen. Tahun 2023 pertumbuhannya kembali melambat menjadi 8,82 persen. Kemudian laju pertumbuhan kategori ini kembali menurun di tahun 2024 menjadi 4,63 persen.

Tabel 4.10. Perkembangan PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	29,59	30,70	33,81	36,01	37,63
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	28,65	29,72	32,51	35,38	37,02
Peranan terhadap PDRB (%)	1,03	1,03	1,02	1,00	0,98
Laju Pertumbuhan (%)	7,27	3,74	9,40	8,82	4,63

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Nilai tambah yang dihasilkan oleh jasa keuangan dan asuransi atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 31,32 miliar rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2023 yang nilai tambahnya sebesar 30,73 miliar rupiah. Selain itu, nilai tambah Jasa Keuangan dan Asuransi atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2020-2024 juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 nilai tambah Jasa Keuangan dan Asuransi atas dasar harga konstan mencapai 20,38 miliar rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan nilai tambah riil dari kategori ini mencapai 2,30 miliar rupiah. Dimana pada tahun 2020, nilai riil yang dihasilkan oleh kategori ini sebesar 18,08 miliar rupiah.

Tahun 2024, pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,42 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,26 persen. Lapangan usaha kategori ini mengalami perlambatan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 1,90 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,14 persen. Meskipun demikian, nilai pertumbuhannya masih bernilai positif yang artinya secara kuantitas nilai tambah yang dihasilkan oleh kategori jasa keuangan dan asuransi meningkat. Perkembangan PDRB dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11. Perkembangan PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	25,12	26,46	29,10	30,73	31,32
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	18,08	18,46	19,46	20,29	20,38
Peranan terhadap PDRB (%)	0,87	0,88	0,88	0,86	0,82
Laju Pertumbuhan (%)	1,90	2,14	5,40	4,26	0,42

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.12 Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton Selatan yang cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2020-2024, secara berturut-turut sumbangan kategori ini yaitu sebesar 1,36 persen; 1,31 persen; 1,27 persen; 1,28 persen dan 1,25 persen pada tahun 2021. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini tahun 2020-2024 berfluktuatif yaitu secara berturut-turut 4,16 persen tahun 2017; 2,28 persen tahun 2018; 3,71 persen tahun 2019; 1,96 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 laju pertumbuhan kategori real estat kembali mengalami kenaikan menjadi 2,64 persen. Meskipun berfluktuatif, kategori real estat masih menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Visualisasi laju pertumbuhan pada kategori ini dapat dilihat pada gambar 4.6.

Tabel 4.12. Perkembangan PDRB Kategori Real Estat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	1,73	1,79	1,95	1,94	2,00
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	1,37	1,42	1,48	1,44	1,48
Peranan terhadap PDRB (%)	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Laju Pertumbuhan (%)	0,91	3,22	4,15	-2,30	2,32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.13 Jasa Perusahaan

Selama lima tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Perusahaan cenderung konstan, yaitu selalu berada pada nilai 0,02 persen. Angka yang kecil ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori lapangan usaha lainnya pada perekonomian Buton Selatan. Dilihat dari segi laju pertumbuhannya, terus terjadi pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2021 yaitu dari -2,34 persen menjadi 0,55 persen, meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 4,15 persen. Barulah pada tahun 2023 kategori lapangan usaha ini kembali menunjukkan penurunan hingga mencapai angka -2,30 persen. Kemudian di tahun 2024, laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan kembali menunjukkan kenaikan menjadi sebesar 2,32 persen.

Tabel 4.12. Perkembangan PDRB Kategori Real Estat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	1,73	1,79	1,95	1,94	2,00
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)	1,37	1,42	1,48	1,44	1,48
Peranan terhadap PDRB (%)	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Laju Pertumbuhan (%)	0,91	3,22	4,15	-2,30	2,32

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan. Selama tahun 2020-2024 peranannya relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi secara berturut-turut sebesar; 2,57 persen; 2,51 persen; 2,28 persen; 2,27 persen; dan 2,52 persen pada tahun 2024. Melihat lebih lanjut mengenai laju pertumbuhannya, dengan nilai yang berfluktuatif kategori ini menunjukkan laju yang negatif pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Yaitu dengan laju sebesar -0,32 persen pada tahun 2020; -0,03 persen pada tahun 2021; -0,07 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan kategori ini mengalami peningkatan pertumbuhan. Laju pertumbuhan kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada tahun 2023 mencapai 6,14 persen dan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 15,04 persen.

4.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2024 kategori Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 5,99 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Buton Selatan. Jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu yaitu pada tahun 2020, kontribusi lapangan usaha kategori jasa pendidikan menunjukkan peningkatan persentase peranan dalam membangun nilai tambah regional Kabupaten Buton Selatan yang ketika itu menyumbang sampai 5,78 persen. Namun demikian, jika ditinjau lebih rinci di setiap tahun selama lima tahun terakhir, kontribusi dari kategori ini cukup berfluktuatif yaitu sebesar 5,78 persen tahun 2020; 5,80 persen tahun 2021; 5,85 persen tahun 2022; 6,05 persen tahun 2023 dan 5,99 persen pada tahun 2024.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Buton Selatan mengalami percepatan hanya pada tahun 2022 dan 2023 saja yaitu sebesar 6,46 persen dan 6,66 persen, sedangkan tahun 2020, 2021, dan 2024 mengalami perlambatan namun masih dalam angka yang positif.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap

perekonomian Kabupaten Buton Selatan sebesar 1,49 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,73 persen. Selama lima tahun terakhir secara berturut-turut kontribusi jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap perekonomian Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2020-2024 yaitu 1,49 persen; 1,46 persen; 1,40persen; 1,33 persen dan 1,28 persen pada tahun 2024. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu menunjukkan nilai yang positif selama lima tahun terakhir meskipun nilainya cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2024, kategori ini menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 2,90 persen, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 7,06 persen.

4.17 Jasa lainnya

Cakupan aktivitas dari kategori Jasa Lainnya mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; serta jasa swasta lainnya. Perkembangan dari kategori ini biasanya terkait kegiatan hiburan dan rekreasi. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Buton Selatan relatif konstan dengan persentase yang cukup kecil yaitu 0,60 hingga 0,62 persen pada tahun 2020; 0,61 persen pada tahun 2021; 0,60 persen pada tahun 2022; 0,62 persen tahun 2023 dan 0,61 persen pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan dari kategori Jasa Lainnya mengalami kenaikan dari -0,23 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,46 persen pada tahun 2024. Capaian pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,45 persen.



LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	960,06	999,00	1141,61	1280,31	1289,97
B. Pertambangan dan Penggalan	737,47	733,76	806,13	863,86	1004,02
C. Industri Pengolahan	102,52	108,91	122,79	102,76	116,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,98	1,07	1,20	1,29	1,33
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,78	7,83	7,90	8,66	8,81
F. Konstruksi	432,43	477,91	502,40	529,80	535,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	246,00	265,16	297,45	331,69	362,65
H. Transportasi dan Pergudangan	25,93	26,14	28,81	31,98	33,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	3,96	4,36	4,63	5,04
J. Informasi dan Komunikasi	29,59	30,70	33,81	36,01	37,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	25,12	26,46	29,10	30,73	31,32
L. Real Estate	1,73	1,79	1,95	1,94	2,00
M,N. Jasa Perusahaan	0,62	0,64	0,73	0,80	0,86
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	73,82	75,06	75,64	81,41	96,26
P. Jasa Pendidikan	166,05	173,72	193,96	217,34	229,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,92	43,61	46,38	47,77	49,06
R,S,T,U. Jasa lainnya	17,81	18,24	19,91	22,19	23,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2874,73	2993,97	3314,10	3593,17	3826,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	2874,73	2993,97	3314,10	3593,17	3826,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	2800,91	2918,92	3238,47	3511,76	3730,34

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	634,21	652,99	708,93	758,20	750,42
B. Pertambangan dan Penggalian	547,74	528,38	525,85	512,07	589,08
C. Industri Pengolahan	71,06	72,69	77,87	62,36	67,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,92	1,01	1,08	1,15	1,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,06	6,06	5,98	6,35	6,37
F. Konstruksi	293,81	321,49	317,43	321,65	323,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	178,62	190,33	201,58	211,16	223,71
H. Transportasi dan Pergudangan	22,44	22,43	22,77	22,88	23,45
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,79	3,00	3,13	3,32
J. Informasi dan Komunikasi	28,65	29,72	32,51	35,38	37,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	18,08	18,46	19,46	20,29	20,38
L. Real Estate	1,37	1,42	1,48	1,44	1,48
M,N. Jasa Perusahaan	0,46	0,46	0,50	0,52	0,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	53,07	53,06	53,02	56,27	64,74
P. Jasa Pendidikan	126,97	131,18	139,66	148,96	154,67
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,92	33,18	34,77	35,04	36,06
R,S,T,U. Jasa lainnya	14,45	14,55	15,50	16,65	17,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2033,59	2080,20	2161,37	2213,51	2320,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	2033,59	2080,20	2161,37	2213,51	2320,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	1980,52	2027,14	2108,36	2157,23	2255,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	33,40	33,37	34,45	35,63	33,71
B. Pertambangan dan Penggalian	25,65	24,51	24,32	24,04	26,24
C. Industri Pengolahan	3,57	3,64	3,71	2,86	3,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,26	0,24	0,24	0,23
F. Konstruksi	15,04	15,96	15,16	14,74	13,99
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,56	8,86	8,98	9,23	9,48
H. Transportasi dan Pergudangan	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
J. Informasi dan Komunikasi	1,03	1,03	1,02	1,00	0,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,88	0,88	0,86	0,82
L. Real Estate	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	2,51	2,28	2,27	2,52
P. Jasa Pendidikan	5,78	5,80	5,85	6,05	5,99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,46	1,40	1,33	1,28
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,62	0,61	0,60	0,62	0,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN	100	100	100	100	100

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	2,96	8,57	6,95	-1,03
B. Pertambangan dan Penggalan	-9,87	-3,53	-0,48	-2,62	15,04
C. Industri Pengolahan	-2,70	2,30	7,12	-19,92	8,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,29	8,93	7,66	5,85	2,20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,75	0,13	-1,38	6,21	0,27
F. Konstruksi	-0,69	9,42	-1,26	1,33	0,42
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,15	6,56	5,91	4,76	5,94
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,59	-0,07	1,52	0,49	2,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,80	0,54	7,69	4,15	6,15
J. Informasi dan Komunikasi	7,27	3,74	9,40	8,82	4,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,90	2,14	5,40	4,26	0,42
L. Real Estate	0,91	3,22	4,15	-2,30	2,32
M,N. Jasa Perusahaan	-2,34	0,55	8,53	4,49	5,45
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,32	-0,03	-0,07	6,14	15,04
P. Jasa Pendidikan	6,73	3,32	6,46	6,66	3,83
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,83	0,79	4,80	0,79	2,90
R,S,T,U. Jasa lainnya	-0,23	0,72	6,50	7,45	4,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,39	2,29	3,90	2,41	4,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	-1,39	2,29	3,90	2,41	4,84

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	151,38	152,99	161,03	168,86	171,90
B. Pertambangan dan Penggalian	134,64	138,87	153,30	168,70	170,44
C. Industri Pengolahan	144,28	149,82	157,69	164,79	171,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	105,69	106,89	110,88	112,97	113,81
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128,37	129,16	132,01	136,35	138,28
F. Konstruksi	147,18	148,66	158,27	164,71	165,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,72	139,31	147,56	157,07	162,10
H. Transportasi dan Pergudangan	115,53	116,54	126,52	139,79	142,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	141,17	141,92	145,11	147,91	151,85
J. Informasi dan Komunikasi	103,31	103,31	103,99	101,79	101,65
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	138,93	143,31	149,52	151,44	153,70
L. Real Estate	126,20	126,56	131,83	134,39	135,45
M,N. Jasa Perusahaan	135,44	138,75	146,21	153,86	157,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	139,09	141,46	142,66	144,66	148,70
P. Jasa Pendidikan	130,78	132,42	138,88	145,90	148,26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,39	131,46	133,38	136,31	136,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	123,28	125,36	128,48	133,26	133,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	141,36	143,93	153,33	162,33	164,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	141,36	143,93	153,33	162,33	164,89

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buton Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,28	1,06	5,26	4,86	1,80
B. Pertambangan dan Penggalan	-1,49	3,14	10,39	10,05	1,03
C. Industri Pengolahan	3,64	3,84	5,25	4,50	4,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	1,13	3,74	1,88	0,75
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,62	2,21	3,29	1,42
F. Konstruksi	0,58	1,00	6,47	4,07	0,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,09	1,16	5,92	6,45	3,20
H. Transportasi dan Pergudangan	2,02	0,88	8,57	10,49	2,09
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,53	2,25	1,93	2,67
J. Informasi dan Komunikasi	-0,64	0,00	0,66	-2,12	-0,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	3,15	4,34	1,28	1,50
L. Real Estate	0,28	0,28	4,17	1,95	0,78
M,N. Jasa Perusahaan	2,97	2,44	5,38	5,23	2,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,66	1,71	0,85	1,40	2,79
P. Jasa Pendidikan	1,26	1,26	4,88	5,05	1,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	0,82	1,46	2,20	-0,20
R,S,T,U. Jasa lainnya	3,29	1,69	2,48	3,72	0,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,36	1,81	6,54	5,87	1,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	0,36	1,81	6,54	5,87	1,58

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Jl. Lamaindo Kel. Laompo Kec. Batauga Kab. Buton Selatan
Email: bps7415@bps.go.id